

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Pahmil. 2015. *Penerapan Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah*. Online. Diakses dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDy5Hq5MDLAhUKm5QKHROMCwQQFghsMA0&url=http%3A%2F%2Fbdkmedan.kemenag.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2FPenerapan-Basis-Akrual-Pada-Laporan-Keuangan-Pemerintah.pdf&usg=AFQjCNGcvhiSs1KrPdhAh7Cj5hWOfbWujg&sig=2=ndYskLq_hUEtVNmjhxMa9g
- Ardiansyah, Misnen. 2010. Konsekuensi Ekonomi Pilihan Kebijakan Akuntansi. *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 9 No. 3.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013*. Padang: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014*. Padang: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. *Pendapat BPK Juni 2015*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. *Pendapat BPK: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015*. Padang: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015*. Padang: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Costa, Imaanuella Fensi da. 2015. Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 1.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. 2014. *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Horngren, Charles T., Walter T, Harrison Jr & Linda Smith, Bamber. 2006. *Akuntansi Jilid 1*. Edisi Keenam. Alih Bahasa Barlian Muhamad. Indeks, Jakarta.

- Immaculata, Maria, Andriani Novitasari. 2014. Adopsi *Accrual Accounting* pada Pemerintahan Republik Indonesia (Studi Literatur). *Jurnal Sosio-Humaniora* Vol. 5 No. 2.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kieso, Donald E., Jerry J, Weygandt & Terry D, Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate Jilid 1*. Edisi Keduabelas. Alih Bahasa Elim Salim. Erlangga, Jakarta.
- Mu'am, Ahmad. 2015. Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara* Edisi 2 No. 1.
- Naruli, Ahmad. 2013. Piutang Tak Tertagih dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada PT. Alfi Putra Trenggalek). *Jurnal Cendekia Akuntansi* Vol. 1 No. 1.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Pasaman Barat.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 107 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Pasaman Barat.
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Solok Selatan.
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyusutan Aktiva Tidak Berwujud.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Prasetyo, Suharno, Kertahadi, Rosalita Rachma Agusti. 2015. Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak

Bumi dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah di Kota Probolinggo. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 2.

Pratolo, Suryo. 2011. Peran Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12 No. 1.

Putra, I Wayan Gde Yogiswara Darma, Dodik Ariyanto. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 13 No. 1.

Ranuba, Erlita D. S, Sifrid Pangemanan, Sherly Pinatik. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1.

Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.

Soetedja, Soengeng. 2008. Analisis Akuntansi sebagai Salah Satu Tahapan dalam Menilai “Nilai Perusahaan” Berbasis Laporan Keuangan. *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 7 No. 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

